

Karena faktor agama atau gaya berpikir? Peran fundamentalisme agama dan *need for closure* dalam memprediksi toleransi politik

Adeline Dinda Caesara* & Whinda Yustisia

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

Abstrak

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif yang kuat antara fundamentalisme agama dan toleransi politik. Meskipun demikian, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan fundamentalisme agama dengan toleransi politik tidak terlalu kuat karena perbedaan individual. Penelitian ini berupaya untuk menguji kembali hubungan antara fundamentalisme agama dan toleransi politik di konteks Indonesia serta melihat efek moderasi *need for closure* terhadap hubungan dua variabel tersebut. Fundamentalisme agama diprediksi memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan toleransi politik di mana *need for closure* dapat memperkuat hubungan keduanya. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian korelasional dilakukan dengan merekrut 211 responden yang beragama Islam dan dijangkau secara daring. Sebanyak 64,9% partisipan adalah perempuan. Rata-rata usia responden adalah 27,52 tahun ($SD=11,309$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama berkorelasi negatif dan signifikan dengan toleransi politik. *Need for closure* memiliki kontribusi sebagai moderator terhadap hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik, khususnya ketika *need for closure* tinggi. Namun, tidak ditemukan peranan individual *need for closure* yang signifikan dalam menjelaskan toleransi politik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran faktor kognitif dalam melemahkan peranan negatif fundamentalisme agama terhadap toleransi politik.

Kata kunci: Fundamentalisme agama, toleransi politik, *need for closure*.

Abstract

Previous studies have found that there is a significant and positive relationship between religious fundamentalism and political tolerance. However, there are also studies that show the relationship between religious fundamentalism and political tolerance is not very strong due to individual differences. This study seeks to reexamine the relationship between religious fundamentalism and political tolerance in Indonesia with the effect of the need for closure as moderation. Religious fundamentalism is predicted to have a positive relationship with political tolerance where the need for closure can strengthen their relationship. To test this hypothesis, correlational research was conducted by recruiting 211 respondents who were Muslim and screened online. About 64,9 % of participants were women. The average age of respondents was 27,52 years old ($SD = 11,309$). The result showed that religious fundamentalism was positively and significantly correlated with political tolerance. The need for closure is significantly contributing as a moderator (strengthen) to the relationship between religious fundamentalism and political tolerance, especially when the need for closure is high. However, there's no significant individual role of need for closure was found in explaining political tolerance. This finding shows the important role of cognitive factors in eliminating the negative role of religious relations in political tolerance.

Keywords: Religious fundamentalism, political tolerance, need for closure.

Pendahuluan

Berdasarkan hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilaksanakan tahun 2018 pada 1.800 responden di Indonesia, ditemukan ada sebanyak 57,88% responden menyatakan hanya akan memiliki pemimpin yang se-

agama. Pemimpin yang dimaksud di sini ialah dari strata yang paling rendah seperti ketua RT sampai strata tertinggi seperti presiden. Dari hasil survei tersebut juga ditemukan ada sebanyak 49% responden yang setuju dengan peraturan syariah dibandingkan peraturan lainnya yang berlaku di negara Indonesia (Pamungkas, 2018;

Wuragil, 2018). Selain itu, sentimen negatif terhadap kaum non muslim akhirnya merambat kepada pelarangan pembangunan rumah ibadah. Pada awal tahun 2019, muncul berita mengenai penolakan pembangunan gereja di wilayah Jakarta Selatan. Terdapat spanduk dengan tulisan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada gereja karena mayoritas penduduk di wilayah tersebut memiliki kepercayaan agama Islam (Pratama & Maulana, 2019). Padahal sebagai warga negara Indonesia terdapat jaminan untuk bebas memeluk kepercayaan agama masing-masing yang diakui, tidak hanya dari agama mayoritas yaitu Islam (Pasal 28E dan 29 ayat 2, UUD 1945) sehingga mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perizinan membangun rumah ibadah-nya di tempat umum.

Dari fenomena tersebut, bisa dilihat bahwa terdapat intoleransi politik terhadap kelompok non muslim di Indonesia. Intoleransi politik diartikan sebagai keengganan untuk memberikan hak-hak sipil pada kelompok yang tidak disukai (Sullivan, Piereson, & Marcus, 1979). Hak-hak sipil yang dimaksud ialah hak untuk mengajar di sekolah, berbicara di depan umum, mendapatkan privasi, dan mencalonkan diri sebagai pemimpin negara atau bagian dari pemerintahan. Definisi ini mirip dengan yang dijelaskan oleh Mujani, Liddle, dan Pepinsky (2018). Namun karena Mujani, Liddle, dan Pepinsky (2018) mengadakan penelitian di Indonesia, di mana kepercayaan agama dipandang sebagai sesuatu yang penting dimiliki sebagai warga negara, sehingga para peneliti berpendapat bahwa menjalankan kepercayaan agama juga termasuk sebagai hak sipil (seperti dapat membangun rumah ibadah kepercayaan agama dan mengadakan acara atau ritual keagamaan di tempat umum). Dalam fenomena ini, kelompok yang tidak disukai dan ditentang hak-hak politiknya merupakan orang-orang dengan latar belakang kelompok berbeda yaitu individu-individu yang tidak memeluk agama Islam. Faktor apa yang menyebabkan orang toleran atau intoleran secara politik? Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan ini.

Sesuai dengan fenomena yang ada, salah satu faktor yang diketahui berperan dalam menjelaskan intoleransi politik ini adalah tingginya fanatisme agama. Dalam literatur psikologi, fanatisme agama ini erat kaitannya dengan fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama diartikan sebagai bentuk kepercayaan agama yang absolut, kekal, tidak mungkin salah, dan tidak dapat diubah (karena sudah ada sejak zaman dahulu) mengenai cara mereka memandang dunia (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Hood, Hill & Williamson, 2005; Koopmans, 2015). Fundamentalisme agama memiliki sifat yang tetap dan

statis karena adanya seperangkat aturan yang tidak dapat dirubah karena dianggap mengandung kebenaran yang paling murni. Oleh karena persepsi mengenai kebenaran tersebut, umumnya orang-orang fundamentalis cenderung mengutamakan aturan dari kepercayaan agamanya dibandingkan dengan aturan lain yang ada di dunia (misalnya aturan-aturan yang ada di negaranya) (Koopmans, 2015).

Ratnasari (2010) menyebutkan bahwa terdapat beberapa gerakan fundamentalis di Indonesia beberapa diantaranya Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Laskar Jihad. Secara keseluruhan, landasan ideologi yang dimiliki oleh gerakan-gerakan tersebut ialah: Pertama, Islam adalah pedoman hidup yang bisa diterapkan di setiap saat karena Agama (*din*) dan negara (*daulah*) tidak dapat dipisahkan. Kedua, mereka ingin kembali kepada akar-akar Islam, yaitu praktik Nabi SAW yang ada sejak dulu karena ini satu-satunya 'jalan yang benar'. Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Adanya penolakan nilai-nilai dari budaya Barat (karena paham sekuler dianggap sangat bertentangan dengan Islam) secara total sehingga nilai-nilai Islam yang 'asli' dapat disebarluaskan. Salah satu contohnya ialah adanya peraturan mengenai zakat yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan sosial terutama di kalangan umat Islam. Keempat, memposisikan syariat Islam sebagai peraturan tertinggi. Hal ini ialah salah satu tahap agar terbentuknya negara Islam sehingga dapat dijalankan dalam hukum negara, seperti hukum perdata (perkawinan, perceraian, waris) atau peraturan yang lebih ekstrim seperti hukum Jinayat (potong tangan), dan lain-lain.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif yang kuat antara fundamentalisme agama dan intoleransi politik (Karpov, 2002; Mason & Feldman, 2011). Selain itu, orang-orang yang fundamentalis cenderung menunjukkan sikap toleransi yang rendah terhadap kelompok luar, seperti lebih enggan untuk memberikan hak kebebasan sipil (McFarland, 1989), menunjukkan prasangka atau kecurigaan (Brandt & Reyna, 2010), dan menunjukkan perilaku negatif terhadap grup atau individu tertentu (Koopmans, 2015). Beberapa contoh perilaku negatif yang ditemukan oleh Koopmans (2015) pada orang-orang fundamentalis agama Kristen dan Islam ialah perilaku antisemitisme, tidak percaya dengan orang Yahudi, menolak berteman dengan homoseksual, serta menganggap penganut agama lain berusaha merusak keyakinan agamanya.

Meskipun demikian, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan fundamentalisme agama dengan toleransi politik tidak terlalu kuat. Salah satu contohnya ialah penelitian

yang dilakukan Ellison & Musick (1993). Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa ternyata ada faktor individual yang juga ikut mempengaruhi toleransi politik, seperti pandangan konservatisme teologis (penilaian personal mengenai pentingnya rutin beribadah, mengikuti pesan-pesan yang ada di ceramah gereja, percaya terhadap Tuhan) ternyata memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap toleransi politik dibandingkan kepercayaan fundamentalis. Selain itu, baru-baru ini ada juga penelitian di Indonesia yang menyatakan sebaliknya, yaitu fundamentalisme agama Islam tidak memiliki hubungan yang berarti dengan toleransi politik. Gender, rendahnya ideologi sekuler, dan pemisahan identitas religius dengan nasionalitas ternyata lebih mempengaruhi toleransi (Wibisono, Yustisia & Louis, 2019).

Adanya penemuan-penemuan tersebut membuat peneliti ingin mencari tahu apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi hubungan antara fundamentalisme agama dengan toleransi politik, khususnya faktor karakteristik individual yang dimiliki oleh orang-orang fundamentalis. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, orang-orang fundamentalis ternyata cenderung memiliki keinginan yang tinggi akan jawaban tegas dan tidak menyukai hal-hal ambigu dibandingkan dengan orang-orang yang kurang religius dan bukan fundamentalis (Brandt & Reyna, 2010; Saroglou, 2002). Hal ini karena orang-orang fundamentalis memiliki kebutuhan untuk mengelola ketidakpastian dan memiliki struktur pengetahuan yang mantap. Dalam literatur psikologi, kebutuhan ini dinamakan *need for closure*.

Need for closure didefinisikan sebagai keinginan individu untuk mendapatkan jawaban yang tegas atas suatu pertanyaan (bertentangan dengan kebingungan dan/atau ambiguitas) dan dapat digambarkan dengan sekelompok ekspresi psikologis seperti berpikiran tertutup, menghindari ketidakpastian, perlunya koherensi, dan intoleransi terhadap ambiguitas (Kruglanski & Webster, 1996; Kruglanski, 2004). *Need for closure* bisa dikategorikan dalam beberapa sub proses dalam berpikir. Kruglanski dan Webster (1996) mendeskripsikan kedua proses yang menandakan individu dengan NFC yang tinggi memproses informasi yaitu *seizing* dan *freezing*. *Seizing* ialah kebutuhan individu untuk membuat sebuah kesimpulan dengan secepat mungkin. Sedangkan *freezing* ialah dimana individu terdorong untuk menahan kesimpulan yang sudah didapat tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Kedua proses inilah yang menyebabkan berkurangnya memproses informasi yang kemudian bisa menyebabkan meningkatnya pemikiran stereotip

atau memiliki prasangka buruk. Karena adanya keinginan untuk memperoleh jawaban yang tegas, sehingga mereka kemungkinan menahan informasi baru yang bisa menantang kesimpulan awal sekaligus mengurangi ketidaknyamanan yang ada karena ketidakpastian (Brandt & Reyna, 2010). Sedangkan orang-orang yang berada di ujung kontinum lainnya (*need for closure* rendah) akan menghindari kesimpulan yang pasti, justru mencari atau menganalisa lebih banyak informasi yang mungkin berkaitan sebelum mengambil sebuah keputusan (Kruglanski, 2004; Kruglanski & Chun, 2008).

Untuk orang-orang dengan *need for closure* yang tinggi, ketidakpastian sering dipandang sebagai kondisi yang mengganggu sehingga dapat ditafsirkan sebagai ancaman (Orehek, dkk., 2010). Ketika orang merasa terancam, mereka cenderung merespons dengan lebih percaya diri dan lebih defensif terhadap keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya serta lebih agresif terhadap mereka yang tidak setuju (Orehek, dkk., 2010). Orang-orang dapat memilih untuk melemahkan perasaan ketidakpastian dengan mengadopsi sikap tertutup dan defensif (Kossowska, Szwed, Wyczesany, Czamek, & Wronka, 2018) dengan secara aktif menghindari informasi yang membangkitkan ketidakpastian atau melemahkan sumber informasi (Haas & Cunningham, 2014; Kossowska, dkk., 2018). Hal ini menyebabkan mereka sangat rentan untuk memiliki prasangka atau penilaian yang buruk terhadap kelompok luar (Brizi, Manetti, & Kruglanski, 2016; Orehek, dkk., 2010; De Zavala, Cislak, & Wesolowska, 2010).

Dari penemuan studi-studi sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memiliki beberapa hipotesis bahwa pertama, fundamentalisme agama memiliki hubungan negatif dengan toleransi politik. Saat seseorang memiliki fundamentalisme agama yang tinggi, kemungkinan ia akan menunjukkan sikap intoleransi politik yang tinggi juga. Hal yang sama diduga juga muncul pada hipotesis kedua, yaitu *need for closure* memiliki hubungan dengan toleransi politik. Saat individu memiliki *need for closure* yang tinggi maka kemungkinan ia akan menunjukkan sikap intoleransi politik yang tinggi juga. Kemudian yang terakhir, *need for closure* pada individu dapat memoderasi hubungan antara fundamentalisme agama dengan toleransi politik. Dengan kata lain, *need for closure* dapat mempengaruhi besar kecilnya peranan fundamentalisme agama terhadap toleransi politik. Secara spesifik, peneliti menduga bahwa *need for closure* bisa memperkuat hubungan antara fundamentalisme agama dengan toleransi politik.

Metode Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fundamentalisme agama dan toleransi politik dengan *need for closure* sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan keduanya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian non-eksperimental, desain korelasional, serta termasuk sebagai penelitian kuantitatif (Gravetter & Forzano, 2012). Kriteria partisipan dalam penelitian ini ialah ditujukan kepada masyarakat umum dengan minimal berusia 18 tahun, menganut agama Islam, bisa mengikuti pemilihan umum dan termasuk warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*, yaitu (1) *convenience sampling*, dimana (pada penelitian yang dilakukan secara daring) individu dapat menjadi responden penelitian sesuai kesediaan individu untuk mengisi kuesioner yang disebar (Gravetter & Forzano, 2012), dan (2) *snowball sampling*, dimana peneliti memberikan jarkom kuesioner penelitian kepada beberapa orang secara personal kemudian meminta kesediaan mereka untuk menyebarkan kepada orang-orang yang sesuai dengan kriteria penelitian lewat sosial media yang mereka miliki.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat ukur toleransi politik yang dikembangkan oleh Mujani, Liddle, dan Pepinsky (2018) berjumlah 5 item. Partisipan diminta untuk menunjukkan persetujuan atas 5 item pernyataan dengan respon jawaban mulai dari 1 ("sangat tidak setuju") sampai dengan 6 ("sangat setuju"). Contoh item: "Orang non-muslim menjadi guru/pengajar di sekolah negeri" dan "Orang non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di daerah sekitar anda". Uji reliabilitas menunjukkan skala ini reliabel ($\alpha = .91$).

Variabel fundamentalisme agama diukur dengan skala fundamentalisme kontratekstual yang diadaptasi oleh Muluk, Sumaktoyo, dan Ruth (2013) berjumlah 3 item (contoh: "Karena Al-Quran tidak mungkin dan tidak pernah salah, maka harus dipahami secara apa adanya sebagaimana yang tertulis"). Partisipan diminta untuk memberi respon jawaban dari 1 ("sangat tidak setuju") hingga 6 ("sangat setuju"). Item-item pada skala ini membentuk skala yang reliabel ($\alpha = .85$).

Sedangkan variabel *need for closure* diukur dengan Need for Closure Scale oleh Roets dan Van Hiel (2011) yang merupakan versi ringkas dari alat ukur *closure* diukur dengan skala yang dikembangkan oleh Webster dan Kruglanski (1994). Skala ini terdiri dari 15 item (contoh: "Saya tidak menyukai situasi yang tidak pasti"). Partisipan memberikan respon jawaban

pada rentang 1 ("sangat tidak setuju") hingga 6 ("sangat setuju"). Uji reliabilitas menunjukkan skala ini reliabel ($\alpha = .86$).

Partisipan direkrut melalui jaringan komunikasi yang disebar pada beberapa sosial media seperti Whatsapp, Line, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dalam jaringan komunikasi tersebut ada link Google Form kuesioner dengan tulisan "bagi yang bersedia silakan klik link berikut ini" sehingga partisipan yang bersedia hanya tinggal klik link yang ada dalam jaringan komunikasi. Setiap responden memiliki kesempatan untuk mendapat undian hadiah saldo Gopay senilai Rp10.000 untuk 25 responden yang beruntung. Dari proses penjangkaran tersebut, peneliti mendapatkan 211 responden (64,9% perempuan, rata-rata usia = 27,52, SD = 11,31).

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian dapat dilihat di Tabel 2. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa fundamentalisme agama ($r = -.36, p < 0.001$) dan *need for closure* ($r = -.21, p = 0.002$) memiliki hubungan yang signifikan negatif dengan toleransi politik. Dalam analisis ini juga ditemukan bahwa beberapa data demografis seperti usia ($r = .332, p < 0.01$) dan tingkat pendidikan terakhir ($r = .258, p < 0.01$) memiliki hubungan yang signifikan negatif dengan toleransi politik (lihat Tabel 1).

Hasil analisis regresi bertahap (*hierarchal multiple regression*) menunjukkan bahwa variabel-variabel demografis menjelaskan 13% varians pada DV, $R^2 = .13, F(3,207) = 10.25, p < .001$. Usia merupakan satu-satunya variabel demografis yang secara signifikan memprediksi toleransi politik ($\beta = -.28, p < .001$), mengindikasikan bahwa semakin tua usia partisipan semakin rendah tingkat toleransi politik. Sementara itu, pendidikan ($\beta = -.13, p = .093$) dan gender ($\beta = .10, p = .150$) tidak memprediksi toleransi politik secara signifikan. Pada tahapan dua, fundamentalisme agama dan *need for closure* ditemukan secara signifikan menambah varian pada toleransi politik sebesar 9%, $R^2_{ch} = .09, F(2,205) = 7.37, p < .001$. Fundamentalisme agama ditemukan secara signifikan memprediksi toleransi politik ($\beta = -.30, p < .001$), mengindikasikan agama semakin tinggi toleransi agama semakin rendah toleransi politik. Sementara itu, *need for closure* tidak mampu secara signifikan memprediksi toleransi politik ($\beta = -.01, p = .949$). Penambahan interaksi fundamentalisme agama dan *need for closure* pada tahap 3, meningkatkan varian pada toleransi politik sebesar 3%, $R^2_{ch} = .03, F(1,204) = 7.37, p < .007$. Interaksi fundamentalisme agama dan *need for closure* ditemukan signifikan ($\beta = -.153, p = .007$). (Lihat Tabel 2).

Tabel 1.*Hasil perhitungan pearson correlation antar variabel penelitian*

Variabel	M	SD	1	2	3	4	5	6
1. Fundamentalisme Agama	4,64	1,48	1	.47**	-.36**	.07	.24**	-.07
2. Need for closure	3,94	.78	.47**	1	-.21**	.09	.24**	-.05
3. Toleransi Politik	4,80	1,08	-.36**	-.21**	1	-.27**	-.33**	.01
4. Pendidikan Terakhir	2,14	1,11	.07	.09	-.269**	1	.56**	.20**
5. Usia	27,52	11,31	.24**	.24**	-.33**	.56**	1	.21**
6. Gender	-	-	-.07	-.05	.01	.20**	.21**	1

** p < 0.01 (2 tailed); * p < 0.05 (2 tailed)

Tabel 2.*Hasil analisis regresi need for closure sebagai moderator*

	B	β (SE)	t	p	LLCI	ULCI	Partial	Part
Tahap 1								
Pendidikan	-.129	-.13(.08)	-1.689	.093	-.280	.022	-.117	-.110
Usia	-.026	-.28(.01)	-3.538	.000	-.041	-.012	-.239	-.229
Gender	.217	.10(.15)	1.445	.150	-.079	.512	.100	.094
Tahap 2								
Pendidikan	-.154	-.16(.07)	-2.105	.036	-.298	-.010	-.145	-.130
Usia	-.017	-.18(.01)	-2.330	.021	-.032	-.003	-.161	-.144
Gender	.138	.06(.14)	.960	.338	-.146	.422	.067	.059
Fundamentalisme Agama	-.220	-.30(.05)	-4.231	.000	-.322	-.117	-.283	-.262
Need for Closure	-.006	-.01(.10)	-.063	.949	-.200	.188	-.004	-.004
Tahap 3								
Pendidikan	-.154	-.16(.07)	-2.145	.033	-.296	-.012	-.149	-.131
Usia	-.016	-.17(.01)	-2.134	.034	-.030	-.001	-.148	-.130
Gender	.145	.07(.14)	1.021	.308	-.135	.425	.071	.062
Fundamentalisme Agama	-.272	-.374(.06)	-4.975	.000	-.379	-.164	-.329	-.303
Need for Closure	-.012	-.01(.10)	-.128	.899	-.203	.179	-.009	-.008
Fundamentalisme Agama*Need for Closure	-.153	-.18(.06)	-2.715	.007	-.264	-.042	-.187	-.165

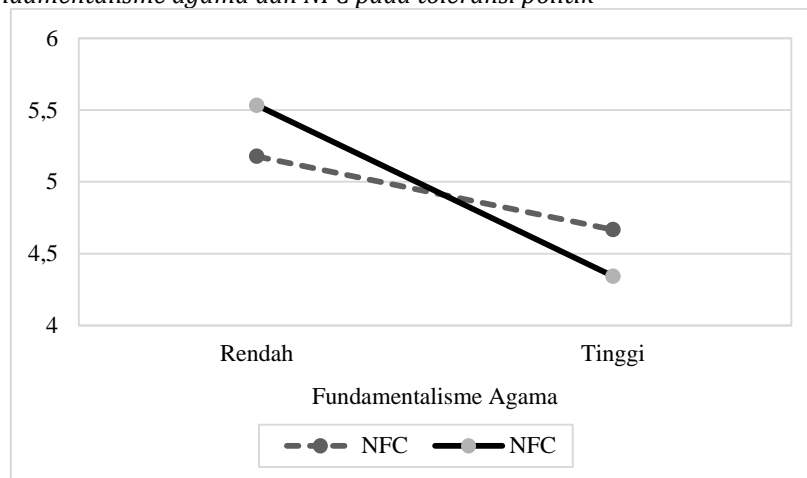
Hasil analisis *simple slope* menunjukkan bahwa hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik semakin negatif ketika *need for closure* tinggi ($\beta = -.39$, $p < .001$) daripada ketika *need for closure* rendah ($\beta = -.15$, $p = .008$). Untuk ilustrasi, lihat Gambar 1.

Sebagai eksplorasi, kami juga melakukan uji *three-way interactions* untuk mengetahui apakah efek moderasi NFC bervariasi dalam hal pendidikan dan usia. Dua dari tiga variabel demografis ini dipilih karena dua variabel ini ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dan mendekati signifikan dengan toleransi politik. Hasil analisis bertingkat (*hierarchal multiple regression*) menunjukkan bahwa interaksi fundamentalisme agama, NFC, dan pendidikan secara signifikan memprediksi toleransi politik ($\beta = .17$, $p = .046$). Sementara itu, interaksi tiga arah

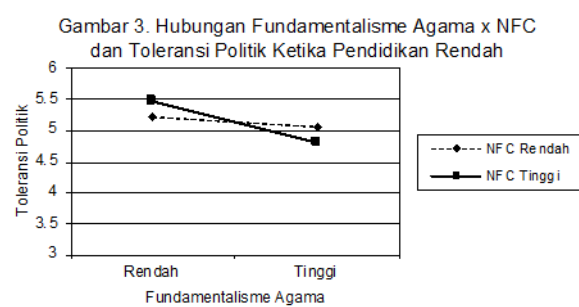
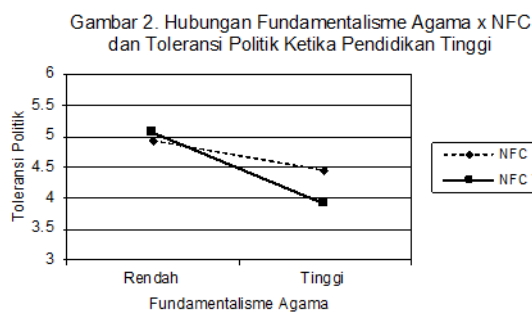
fundamentalisme agama, NFC, dan usia tidak secara signifikan memprediksi toleransi politik ($\beta = -.13$, $p = .134$). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik signifikan pada dua kondisi. Pertama, yaitu ketika NFC rendah dan pendidikan tinggi ($\beta = -.37$, $p = .001$). Kedua, yaitu ketika NFC tinggi dan pendidikan rendah ($\beta = -.57$, $p < .001$). Hubungan interaksi mendekati signifikan ketika NFC tinggi dan pendidikan tinggi ($\beta = -.31$, $p = .079$). Terakhir, hubungan interaksi tiga arah tidak signifikan ketika NFC rendah dan pendidikan rendah ($\beta = -.09$, $p = .438$). Ilustrasi analisis interaksi fundamentalisme agama dan NFC pada kondisi pendidikan rendah dan tinggi bisa dilihat pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 1.

Efek interaksi fundamentalisme agama dan NFC pada toleransi politik

**Gambar 2 & 3.**

Hubungan fundamentalisme agama x NFC dan toleransi politik ketika pendidikan tinggi dan rendah



Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hubungan kedua variable tersebut bergantung pada faktor individual, seperti *need for closure*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa toleransi agama memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan toleransi politik. Analisis moderasi menunjukkan hubungan kedua variabel semakin negatif dan signifikan ketika *need for closure* tinggi. Sebagai eksplorasi, penelitian ini juga melihat hubungan tiga arah fundamentalisme agama, *need for closure*, dan pendidikan. Analisis menunjukkan bahwa hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik secara signifikan negatif ketika NFC rendah dan pendidikan tinggi, serta ketika NFC tinggi dan pendidikan rendah.

Hasil utama penelitian yang menunjukkan bahwa fundamentalisme agama memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan

toleransi politik sesuai dengan studi-studi sebelumnya. Penelitian terdahulunya telah mendokumentasikan bahwa fundamentalisme agama merupakan salah satu prediktor dari sikap toleransi politik terhadap kelompok yang dianggap termasuk kelompok luar (Karpov, 2002; Mason & Feldman, 2011) dengan cara menunjukkan sikap yang negatif (Koopsman, 2015; Wilcox & Jelen, 1990). Hasil ini memperkuat argumen penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa orang-orang fundamentalis memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi kemurnian nilai-nilai yang ada dalam kepercayaannya (Elison & Musick, 1993), dan salah satu aksi yang ditunjukkan oleh mereka sebagai bentuk perlindungan ialah dengan membatasi keterlibatan orang-orang di luar kelompoknya terlibat dalam ruang politik (Koopsman, 2015). Dalam penelitian ini, kelompok luar yang dimaksud adalah orang-orang di luar kelompok agamanya. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan fundamentalisme agama juga terkait dengan prasangka dan sikap negatif terhadap kelompok homoseksual

dan orang-orang berbeda ras (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Brandt & Van Tongeren, 2015).

Hasil kedua ialah mengenai hubungan antara *need for closure* dan toleransi politik yang ditemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (mis. Burket, dkk., 2017, Roets & Van Hiel, 2011; van Hiel, Pandelaere, & Duriez, 2004). Namun demikian, sebagian penelitian lain menunjukkan bahwa NFC tidak selalu membuat individu memiliki penilaian yang negatif terhadap kelompok luar. Individu dengan NFC tinggi lebih rentan memiliki pandangan negatif atau stereotip terhadap kelompok luar karena memiliki motivasi untuk mendapatkan jawaban jelas dengan cepat. Hal ini menjadikan orang-orang dengan NFC tinggi cenderung tidak termotivasi mencari informasi lain yang lebih dalam dan menghindari informasi yang kontradiktif. Tetapi untuk membentuk pandangan yang negatif dan stereotip pada individu dengan NFC yang tinggi tidak selalu bisa dicapai jika tidak dibarengi oleh kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. Kossowska dan Bar Tal (2013) serta Kossowska, Dragon, dan Bukowski (2015) menemukan bahwa *ability to achieve closure* (AAC) bisa mempengaruhi hubungan antara *need for closure* dengan penilaian dan sikap negatif yang ditunjukkan kepada kelompok luar. *Ability to achieve closure* (AAC) ialah aspek lain dari ranah *cognitive closure* terkait kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang cepat dalam hidupnya. Tingginya AAC pada individu telah ditemukan memiliki hubungan yang kuat dengan *heuristic processing style* atau kerangka pemikiran stereotipikal (Kossowska & Bar Tal, 2013). Sehingga individu dengan NFC tinggi tetapi AAC rendah mungkin saja bisa tidak mengandalkan informasi stereotipikal dalam menilai kelompok luar (Kossowska & Bar Tal, 2013; Kossowska, Dragon & Bukowski, 2015).

Hasil selanjutnya ialah mengenai peran moderasi *need for closure* dalam hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa orang-orang fundamentalis mungkin saja menunjukkan sikap toleransi politik yang lebih rendah saat dihadapkan dengan kelompok luar karena memiliki motivasi untuk mempertahankan kemurnian kepercayaannya. Kondisi ini secara seharusnya membentuk gaya kognitif yang kaku, menghindari ketidakpastian, dan selalu ingin jawaban tegas atas suatu pernyataan atau dengan kata lain memiliki NFC yang tinggi. Namun, pada penelitian ini kami berargumen bahwa fundamentalisme agama bukanlah sumber utama NFC. Kami berargumen bahwa *need for closure* meru-

pakan perbedaan individual yang dapat terbentuk oleh faktor-faktor lain selain fundamentalisme agama, misalnya pola asuh. Beberapa penelitian tentu telah menunjukkan bahwa *need for closure* juga ditemukan pada orang-orang yang tidak religius dan fundamentalis sekalipun (mis., Deschesne, Janssen, & van Knippenberg, 2000; Kruglanski, Shah, Pierro, & Mannet, 2002). Selain itu penelitian terdahulu juga telah menunjukkan bagaimana *need for closure* dapat bervariasi karena faktor situasi, seperti tekanan waktu (Kruglanski, dkk., 2002), suara bising (Kruglanski, dkk., 1993), dan kelelahan (Webster, dkk., 1996). Sebagai eksplorasi, kami tentunya juga mencoba melakukan uji mediasi untuk melihat apakah sebenarnya hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik dimediasi oleh NFC, bukan dimoderasi seperti yang kami temukan. Hasil analisis menunjukkan tidak ada peran mediasi NFC yang signifikan.

Terakhir, sebagai eksplorasi kami mencoba melakukan uji interaksi tiga jalur antara fundamentalisme agama, NFC, dan dua faktor demografis (usia dan pendidikan). Temuan analisis ini mengindikasikan adanya peran penting pendidikan dalam memperkuat peran NFC. Meskipun NFC rendah, tetapi jika individu memiliki pendidikan tinggi, hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik menjadi signifikan. Selain itu, ketika NFC dan pendidikan individu tinggi, hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik juga ditemukan mendekati signifikan. Temuan ini bertentangan dengan sebagian penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dalam meningkatkan toleransi politik (mis., Bobo & Licari, 1989; Borgonovi, 2012). Ide utamanya adalah orang berpendidikan tinggi memiliki kemampuan kognitif yang lebih canggih (Bobo & Licari, 1989) dan memiliki akses informasi dan interaksi yang lebih beragam (Borgonovi, 2012). Namun demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hanya berkaitan dengan dukungan perlakuan kesetaraan individual, seperti hak-hak individual, tidak dengan dukungan terhadap kesetaraan kelompok (Jackman & Muha, 1984). Orang-orang dengan pendidikan tinggi justru memiliki mekanisme yang lebih canggih dalam mempertahankan status kelompoknya dibandingkan orang-orang dengan pendidikan rendah. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bagaimana kepakaran berkaitan dengan bias dalam mengolah informasi (Ottati, Price, Wilson, & Sukmatoyo, 2015). Semakin seseorang merasa ia pakar dalam sebuah topik semakin ia merasa berhak untuk tertutup terhadap berbagai informasi yang tersedia.

Meskipun penelitian ini telah memberikan temuan-temuan bermanfaat dalam memahami toleransi politik, penelitian ini bukan tanpa batasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian korelasional, sehingga kausalitas temuan penelitian masih belum bisa dipastikan. Kedua, hasil analisis tiga arah yang kami lakukan memiliki kekuatan yang rendah mengingat jumlah sampel yang sedikit. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel sehingga hasil analisis tiga arah memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Terakhir, ada baiknya penelitian dilakukan pada kelompok orang-orang yang memang tergabung dalam kelompok-kelompok fundamentalis. Orang-orang yang tergabung pada kelompok ini terpapar pada pemahaman agama fundamentalis secara lebih dominan daripada masyarakat umum. Norma kelompok menuntut mereka untuk menginterpretasikan pemahaman agama dalam berbagai konteks kehidupan secara ketat dan konsisten. Sementara itu, masyarakat umum, terutama di Indonesia, bisa jadi pemahaman agama tekstual yang dipahami adalah perihal melaksanakan nilai-nilai ibadah, bukan nilai sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan NFC mampu memoderasi hubungan fundamentalisme agama dan toleransi politik. Jika penelitian dilakukan pada orang-orang fundamentalis yang tergabung pada kelompok fundamentalis (formal), mungkin, NFC mungkin tidak mampu memoderasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pengolahan statistik yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama memiliki hubungan secara negatif dan signifikan dengan toleransi politik. Hal ini berarti semakin tinggi fundamentalisme agama Islam yang dimiliki oleh individu, maka semakin rendah toleransi politik yang ditunjukkan terhadap kelompok non-Muslim (kelompok kelompok luar dalam penelitian ini). Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa hubungan kedua variabel ini dimoderasi oleh NFC.

Berdasarkan temuan-temuan ini, salah satu implikasi praktis yang dapat ditawarkan ialah memberikan pendidikan-pendidikan yang dapat menurunkan NFC pada orang-orang yang memiliki pemahaman agama fundamentalis. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pendidikan sastra dan seni yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya (mis., Kurniawan, Mujahid, & Usman, 2016).

Daftar Pustaka

- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. *The International Journal for The Psychology of Religion*, 2(2), 113-133. http://doi.org/10.1207/s15327582ijpr02_02_5
- Borgonovi, F. (2012). The relationship between education and levels of trust and tolerance in Europe 1. *The British Journal of Sociology*, 63(1), 146-167. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2011.01397.x>
- Brandt, M. J., & Reyna, C. (2010). The role of prejudice and the need for closure in religious fundamentalism. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(5), 715-725. <http://doi.org/10.1177/0146167210366306>.
- Brandt, M. J., & Reyna, C. (2010). The role of prejudice and the need for closure in religious fundamentalism. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(5), 715-725. <http://doi.org/10.1177/0146167210366306>.
- Brandt, M. J., & Van Tongeren, D. R. (2015). People Both High and Low on Religious Fundamentalism Are Prejudiced Toward Dissimilar Groups. *Journal of Personality and Social Psychology*. <http://doi.org/10.1037/pspp0000076>
- Brizi, A., Mannetti, L., & Kruglanski, A. W. (2016). The closing of open minds: Need for closure moderates the impact of uncertainty salience on outgroup discrimination. *British Journal of Social Psychology*, 55(2), 244-262.
- Burke, S. E., Dovidio, J. F., LaFrance, M., Przedworski, J. M., Perry, S. P., Phelan, S. M., ... & van Ryn, M. (2017). Beyond generalized sexual prejudice: Need for closure predicts negative attitudes toward bisexual people relative to gay/lesbian people. *Journal of Experimental Social Psychology*, 71, 145-150.
- De Zavala, A. G., Cislak, A., & Wesolowska, E. (2010). Political conservatism, need for cognitive closure, and intergroup hostility. *Political Psychology*, 31(4), 521-541. <http://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00767.x>
- Dechesne, M., Janssen, J., & van Knippenberg, A. (2000). Derogation and distancing as terror management strategies: The moderating role of need for closure and permeability of group boundaries. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(6),

- 923-932. <http://doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.923>
- Ellison, C. G., & Musick, M. A. (1993). Southern intolerance: A fundamentalist effect?. *Social Forces*, 72(2), 379-398. <http://doi.org/10.1093/sf/72.2.379>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160.
- Gravetter, F. J. & Forzano, L. B. (2012). *Research methods for the behavioral sciences*. Wadsworth: Cengage Learning/
- Haas, I. J., & Cunningham, W. A. (2014). The uncertainty paradox: Perceived threat moderates the effect of uncertainty on political tolerance. *Political Psychology*, 35(2), 291-302. <http://doi.org/10.1111/pops.12035>
- Hood, R. W., Hill, P. C. & Williamson, W. P. (2005). *The Psychology of Religious Fundamentalism*. New York, NY: The Guilford Press.
- Jackman, M., & Muha, M (1984). Education and intergroup attitudes: Moral enlightenment, superficial democratic commitment, or ideological refinement?. *American Sociological Review* 49:751-769. <http://doi.org/10.2307/2095528>
- Kami, I. (2016). *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>
- Karpov, V. (2002). Religiosity and tolerance in the United States and Poland. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 41(2), 267-288. <http://doi.org/10.1111/1468-5906.00116>
- Koopmans, R. (2015). Religious fundamentalism and hostility against out-groups: A comparison of Muslims and Christians in Western Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41(1), 33-57. <http://doi.org/10.1080/1369183X.2014.935307>
- Kossowska, M., & Bar Tal, Y. (2013). Need for closure and heuristic information processing: The moderating role of the ability to achieve the need for closure. *British Journal of Psychology*, 104(4), 457-480
- Kossowska, M., Dragon, P., & Bukowski, M. (2015). When need for closure leads to positive attitudes towards a negatively stereotyped outgroup. *Motivation and Emotion*, 39(1), 88-98. <http://doi.org/10.1007/s11031-014-9414-5>
- Kossowska, M., Szwed, P., Wyczesany, M., Czarnek, G., & Wronka, E. (2018). Religious Fundamentalism Modulates Neural Responses to Error-Related Words: The Role of Motivation Toward Closure. *Frontiers in Psychology*, 9, 285. <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00285>.
- Kruglanski, A. W., Shah, J. Y., Pierro, A., & Mannetti, L. (2002). When similarity breeds content: Need for closure and the allure of homogeneous and self-resembling groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(3), 648-662. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.3.648>
- Kruglanski, A. W., & Chun, W. Y. (2008). *Motivated Closed-Mindedness and Its Social Consequences*. Handbook of motivation science, 84-99.
- Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: "Seizing" and "freezing". *Psychological Review*, 103(2), 263-283. <http://doi.org/10.1037/0033-295X.103.2.263>
- Kruglanski, A. W. (2004). *The psychology of closed mindedness*. New York, NY: Psychology Press.
- Kruglanski, A. W., Webster, D. M., & Klem, A. (1993). Motivated resistance and openness to persuasion in the presence or absence of prior information. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 861-876.
- Kurniawan, W., Mujahid, D. R., & Usman, Y. A. (2018). Apakah sastra mampu menurunkan cognitive closure pada narapidana terorisme di indonesia?. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(2), 114-124. <http://doi.org/10.7454/jps.2018.11>
- Mason, L., & Feldman, S. (2011). *Religion, Fundamentalism, and Political Intolerance*. In annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL.
- Maulana, F. & Pratama, F. (2019). *Muncul Spanduk Penolakan Gereja di Jaksel, Polisi: Sudah Dicapot*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4386061/muncul-spanduk-penolakan-gereja-di-jaksel-polisi-sudah-dicapot>
- McFarland, S. G. (1989). Religious orientations and the targets of discrimination. *Journal for The Scientific Study of Religion*, 324-336. <http://doi.org/10.2307/1386743>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Pepinsky. (2018). *Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical democrats*.

- Cambridge University Press.
- Muluk, H., Sumaktoyo, N. G., & Ruth, D. M. (2013). Jihad as justification: National survey evidence of belief in violent jihad as a mediating factor for sacred violence among Muslims in Indonesia. *Asian Journal of Social Psychology*, 16(2), 101-111.
- Orehek, E., Fishman, S., Dechesne, M., Doosje, B., Kruglanski, A. W., Cole, A. P., Jackson, T. (2010). Need for closure and the social response to terrorism. *Basic and Applied Social Psychology*, 32, 279-290. <http://doi.org/10.1080/01973533.2010.519196>
- Pamungkas, C. (2019). LIPI Ungkap Fenomena Sosial Intoleransi dan Radikalisme. [Lipi.go.id](http://lipi.go.id). <http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Ungkap-Fenomena-Sosial-Intoleransi-dan-Radikalisme/21357>
- Ratnasari, D. (2010). Fundamentalisme Islam. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 40-57.
- Roets, A. & Van Hiel, A. (2011). Item selection and validation of a brief, 15-item version of the need for closure scale. *Personality and Individual Differences*, 50, 90-94. <http://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.004>
- Saroglou, V. (2002). Beyond dogmatism: The need for closure as related to religion. *Mental Health, Religion & Culture*, 5(2), 183-194. <http://doi.org/10.1080/13674670210144130>.
- Shah, J. Y., Kruglanski, A. W., & Thompson, E. P. (1998). Membership has its (epistemic) rewards: need for closure effects on in-group bias. *Journal of personality and social psychology*, 75(2), 383.
- Schwadel, P., & Garneau, C. R. (2014). An Age-Period-Cohort Analysis of Political Tolerance in the United States. *The Sociological Quarterly*, 55(2), 421-452. <http://doi.org/10.1111/tsq.12058>
- Sohuturon, M. (2017). *Demo Anti Ahok GNPF-MUI Bidik Pengadilan, Kejaksaan dan MA*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170426124002-12-210203/demo-anti-ahok-gnpf-mui-bidik-pengadilan-kejaksaan-dan-ma>
- Sullivan, J. L., Piereson, J. E., & Marcus, G. E. (1979). An alternative conceptualization of political tolerance: Illusory increases 1950s-1970s. *The American Political Science Review*, 73(2), 781-794. <http://doi.org/10.2307/1955404>
- Sullivan, J. L., Marcus, G. E., Feldman, S., & Piereson, J. E. (1981). The sources of political tolerance: A multivariate analysis. *American Political Science Review*, 75(1), 92-106. <http://doi.org/10.2307/1962161>.
- van Hiel, A., Pandelaere, M., & Duriez, B. (2004). The Impact of Need for Closure on Conservative Beliefs and Racism: Differential Mediation by Authoritarian Submission and Authoritarian Dominance. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30(7), 824-837. <https://doi.org/10.1177/0146167204264333>.
- Webster, D. M., Richter, L., & Kruglanski, A. W. (1996). On leaping to conclusions when feeling tired: Mental fatigue effects on impressionality. *Journal of Experimental Social Psychology*, 32, 181-195.
- Wibisono, S., Yustisia, W., & Louis, W. (2019). Perceived Association of Religion and Nation, and More Secular Ideology, Can Improve Political Tolerance Amongst the Muslim Majority in Indonesia. <https://sasp.org.au/timetable/event/wibisono/>
- Wilcox, C., & Jelen, T. (1990). Evangelicals and political tolerance. *American Politics Quarterly*, 18(1), 25-46. <http://doi.org/10.1177/1532673X900180102>
- Wuragil, Z. (2018). LIPI: Intoleransi Politik Tinggi Karena Faktor Agama. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1153349/lipi-intoleransi-politik-tinggi-karena-faktor-agama>